



## Esensi dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional

### *The Essence and Urgency of the Balance of Rights and Obligations in National Education and Culture*

Athaya Wahyu Garjita<sup>1\*</sup>, Wine Tiara Cipta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Teknologi Pendidikan, FKIP, Universitas Sebelas Maret

Email : [athayawahyu@student.uns.ac.id](mailto:athayawahyu@student.uns.ac.id)<sup>1\*</sup>, [winetiara@student.uns.ac.id](mailto:winetiara@student.uns.ac.id)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 17-06-2025

Revised : 18-06-2025

Accepted : 20-06-2025

Published : 23-06-2025

#### Abstract

*Nation education and culture play a strategic role in shaping national character and identity, especially amidst globalization. The balance between the right to education and the obligation to preserve and develop culture is key to creating a harmonious and civilized society. This article discusses the importance of individual awareness regarding rights and obligations through character education based on local culture, which can strengthen national identity and prevent the erosion of national values. Using a literature review method, the article examines various academic sources to demonstrate that implementing a balance between rights and obligations in national education and culture is crucial for supporting sustainable development and enriching the nation's civilization.*

**Keywords :** *balance of rights and obligations, national education, culture*

---

#### Abstrak

Pendidikan dan kebudayaan nasional berperan strategis dalam membangun karakter dan identitas bangsa, terutama di tengah arus globalisasi. Keseimbangan antara hak memperoleh pendidikan dan kewajiban menjaga serta mengembangkan kebudayaan menjadi kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Artikel ini membahas pentingnya kesadaran individu terhadap hak dan kewajibannya melalui pendidikan karakter berbasis budaya lokal, yang dapat memperkuat identitas nasional serta mencegah erosi jati diri bangsa. Dengan metode literature review, artikel ini mengkaji berbagai sumber akademik untuk memperlihatkan bahwa implementasi keseimbangan hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan nasional sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkaya peradaban bangsa.

**Kata Kunci :** *keseimbangan hak dan kewajiban, pendidikan nasional, kebudayaan*

#### PENDAHULUAN

Pendidikan dan kebudayaan nasional memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa serta memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan memperjuangkan hak kita (Haifarashin, Furnamasari, dan Dewi, 2021). Keseimbangan antara hak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban dalam menjaga serta mengembangkan budaya menjadi kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Pendidikan karakter berbasis



budaya lokal dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan globalisasi yang mengancam nilai-nilai kebangsaan. Hal ini, menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Urgensi dari keseimbangan hak dan kewajiban ini semakin penting di era modern yang penuh tantangan identitas budaya. Dari hasil riset oleh Sari dan Siswanto (2021) menunjukkan bahwa Pendidikan karakter berbasis budaya lokal dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional yang mengabaikan dimensi budaya justru akan mempercepat erosi jati diri bangsa. Oleh sebab itu, membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan nasional adalah salah satu keharusan. Pendidikan karakter berbasis budaya lokal hanya dapat tercapai apabila peserta didik menyadari haknya untuk belajar dan kewajibannya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kebudayaan. Kesadaran ini menjadi pondasi untuk memperkuat solidaritas nasional dan memperkaya peradaban bangsa.

Selain itu, penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal juga dapat memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Zulkarnaen (2020) menyatakan bahwa “Agar generasi muda tidak melupakan kearifan lokal bangsa Indonesia, diperlukan sebuah upaya pengimplementasian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dengan mengambil nilai dari budaya yang memiliki makna mendalam untuk dijadikan sebagai rujukan pendidikan karakter”. Dengan begitu, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dapat menjadi benteng dalam menjaga keutuhan dan keberagaman budaya nasional

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan juga penting untuk membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap pembangunan bangsa. Keseimbangan antara hak memperoleh pendidikan dan kewajiban berkontribusi dalam pelestarian budaya nasional membentuk identitas kolektif yang kuat dalam masyarakat. Tanpa kesadaran tersebut, pendidikan hanyalah menjadi instrumen pragmatis tnpa nilai kebangsaan yang kokoh. Penerapan prinsip keseimbangan ini berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan budaya. Implementasi hak dan kewajiban secara seimbang dalam pendidikan akan memperkuat ketahanan budaya nasional dan mendukung terciptanya inovasi berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Dalam konteks negara Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban memiliki peran krusial, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sementara di sisi lain, ada kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan tersebut. Begitu pula dalam pelestarian kebudayaan, hak menikmati kekayaan budaya harus sejalan dengan kewajiban menjaga dan melestarikannya.

Untuk menggali lebih dalam tentang hal ini, artikel ini merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa pemikir besar, di antaranya John Locke, Ki Hajar Dewantara, dan Soepomo, serta kajian mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui teori-teori ini, kita dapat memahami bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban seharusnya diimplementasikan dalam pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Tabel 1



menyajikan ringkasan pandangan para ahli tersebut sebagai dasar untuk lebih memahami relevansi topik ini dalam konteks pendidikan dan kebudayaan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan metode literature review yang bertema "Esensi dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional" dimulai dengan menentukan fokus utama, yaitu memahami keseimbangan antara hak, seperti hak atas pendidikan, dan kewajiban, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci yang berkaitan, seperti "Hak dan kewajiban dalam pendidikan," "Pendidikan dan kebudayaan nasional," dan juga "Urgensi kewajiban dalam kebudayaan." Dari pencarian tersebut, artikel yang sesuai dan dipilih, dilihat kesesuaian tema dan kredibilitas sumbernya. Setelah itu, dalam menyusun literature review, artikel-artikel tersebut dibahas untuk menggali topik yang sesuai untuk dibahas. Pembahasan ini dapat mencakup hak warga negara dalam pendidikan dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelestarian kebudayaan, serta hubungan keduanya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, kemudian artikel disaring dan dianalisis untuk menghasilkan artikel tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 1.**

Ringkasan Pendapat Ahli tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional

No	Nama/Ahli Teori	Pendapat tentang Hak dan Kewajiban	Relevansi dengan Pendidikan dan Kebudayaan
1	John Locke	Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang untuk menciptakan masyarakat adil dan harmonis.	Menjadi landasan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
2	Ki Hajar Dewantara	Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai budaya luhur dan tanggung jawab sosial pada peserta didik.	Pendidikan budaya dan seni menjadi bagian penting dalam kurikulum untuk melestarikan identitas bangsa.
3	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab.	Menegaskan pentingnya keseimbangan hak mendapat pendidikan dan kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
4	Soepomo	Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah prinsip utama dalam membangun negara	Diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan rasa tanggung



---

kesatuan dan kesejahteraan jawab berbangsa dan bernegara  
rakyat. pada peserta didik.

---

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Semua ahli sepakat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. John Locke menekankan pentingnya keseimbangan ini sebagai dasar pembentukan karakter siswa, yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidikan Berbasis Budaya: Ki Hajar Dewantara dan UU No. 20 Tahun 2003 menyoroti pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada nilai-nilai budaya dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis budaya lokal dapat memperkuat identitas nasional dan mencegah erosi nilai-nilai kebangsaan.
3. Prinsip Kewarganegaraan: Soepomo menekankan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban merupakan prinsip utama dalam membangun negara yang sejahtera. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Temuan literatur ini menegaskan bahwa penerapan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan sangat penting untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis budaya lokal tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam konteks globalisasi saat ini.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 1, terlihat bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para pemikir ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks pendidikan dan kebudayaan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Locke (1980), hak dan kewajiban harus berjalan seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam pendidikan, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sementara pada saat yang sama, mereka juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada.

Pendidikan karakter berbasis budaya lokal menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengancam identitas nasional. Dewantara (2004) menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya luhur dan tanggung jawab sosial pada peserta didik. Dengan mengintegrasikan pendidikan budaya dan seni ke dalam kurikulum, kita tidak hanya melestarikan identitas bangsa, tetapi juga memperkuat karakter siswa. Hal ini sejalan dengan temuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab.

Soepomo (1959) menyoroti bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah prinsip utama dalam membangun negara kesatuan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hal ini berarti bahwa peserta didik harus diajarkan untuk memahami dan



menghargai hak-hak mereka sebagai warga negara, sekaligus menyadari tanggung jawab mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif akan menanamkan rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara, yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Adapun kaitannya dengan identitas nasional, implementasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, kita dapat memperkuat solidaritas nasional dan memperkaya peradaban bangsa. Temuan literatur menunjukkan bahwa pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dapat menjadi benteng dalam menjaga keutuhan dan keberagaman budaya nasional. Hal ini sangat relevan di era modern yang penuh tantangan identitas budaya, seperti yang ditunjukkan oleh Sari dan Siswanto (2021) dalam penelitian mereka.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan nasional adalah kunci untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, kita tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan ini.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan nasional merupakan elemen kunci dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban, individu dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, menciptakan solidaritas nasional, dan memperkaya peradaban bangsa. Temuan dari berbagai ahli, seperti Locke, Dewantara, dan Soepomo, menunjukkan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kewarganegaraan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewantara, K. H. (2004). Pendidikan: Pemikiran, pelaksanaan, dan pemikiran ulang. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Press.
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261-7265.
- Locke, J. (1980). *Second treatise of government*. Hackett Publishing Company
- Mulyadi., A., & Sari, D.R. (2020). Pendidikan karakter berbasis budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 3(1).



Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Sari, D.R., & Siswanto, A. (2021). Pendidikan karakter berbasis budaya lokal dalam pembelajaran sosiologi di SMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(2).

Soepomo. (1959). Hubungan individu dan negara dalam negara integralistik. Balai Pustaka.

Waseso, M.G. 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan artikel dan Pengelolaan jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 9-11 Agustus

Zulkarnaen, M. (2022). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di era milenial. *Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 1-11.